



DPRD Kota Tambah Dua Kendaraan Dinas

YOGYA, TRIBUN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta kembali menambah kendaraan dinas operasional yakni sebanyak dua buah.

"Belanja dua mobil dinas operasional ini masuk dalam APBD Perubahan 2017 dan APBD Murni 2018. Jenis mobilnya Toyota Hiace dengan anggaran satu kendaraan sekitar Rp450 jutaan sekian," ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Kadri Renggono.

Ia menjelaskan, pengadaan dua mobil dinas operasional dewan sudah sesuai yang diusulkan tahun lalu,

namun baru terakomodasi dalam APBD tahun depan. Terkait adanya tunjangan transportasi bagi semua anggota dewan, Kadri mengaku tidak ada hubungannya karena kendaraan itu merupakan kendaraan operasional lembaga, bukan personal.

Sekretaris DPRD Kota Yogyakarta Prima Hastawan membenarkan adanya tambahan dua kendaraan dinas operasional. Ia mengatakan dua Toyota Hiace itu diusulkan sebelum keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Namun saat

itu yang disetujui justru tiga unit Toyota Innova yang kini sudah ada di DPRD.

"Kalau Hiace sudah datang, nanti kami tunggu kajian dari Pemerintah Kota apakah (tiga Toyota Innova) akan dikembalikan atau tetap dioperasionalkan di dewan," ungkap Prima.

Ia mengatakan pengadaan mobil Hiace sesuai dengan kebutuhan. Sebab diakuinya kendaraan operasional masih kurang jika semua anggota dewan mengadakan kegiatan diluar secara bersamaan.

"Ada tiga unit KIA Travello sudah tidak bisa digunakan dan akan segera dikembalikan," sebutnya.

Total mobil dinas operasional yang ada di dewan saat ini sebanyak 13 unit, tiga unit di antaranya adalah mobil dinas jabatan pimpinan dewan, empat Toyota Innova, tiga KIA Travello, dan tiga unit tambahan New Toyota Innova.

"Saya pastikan semua kendaraan dinas saat ini diparkir di Dewan, kecuali mobil jabatan pimpinan," kata Prima.

Untuk diketahui, anggota dewan tidak diperkenankan membawa mobil dinas operasional selain kepentingan tugas. Pasalnya, anggota dewan saat ini sudah mendapat tunjangan transportasi yang besarnya sekitar Rp 7,9 juta per bulan per anggota dewan. (gll)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005